

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penduduk negara kawasan Asia Tenggara banyak di dominasi oleh penduduk beragama Islam. Sejarah masuknya Islam ditandai dengan adanya interaksi antara masyarakat kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Yaman, serta Arabia Selatan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kondisi tersebut dimanfaatkan para pedagang Muslim untuk menyebarkan agama Islam. Menurut data pada tahun 2014 mayoritas penduduk muslim mendiami negara Indonesia yakni sekitar 85%, dari Malaysia 61,3%, dan dari Brunei Darussalam 67%, sedangkan penduduk muslim negara kawasan Asia Tenggara yang lain berada dibawah itu.¹

Ketiga negara diatas termasuk kedalam negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam namun bukan disebut negara Islam karena sistem negaranya tidak berlandaskan ideologi Islam dan hanya Brunei Darussalam satu-satunya negara yang berbasis Islam di kawasan Asia Tenggara. Negara ini memiliki penduduk yang mayoritas bercorak Islam Melayu. Negara Brunei sendiri berbatasan langsung dengan negara Malaysia, karena hampir seluruh wilayah Brunei, yaitu sisi timur, selatan dan barat, dikelilingi oleh wilayah Malaysia, yaitu oleh negara bagian

¹ Rahmawati, *Islam Di Asia Tenggara*, Jurnal Rihlah, Vol, 11, No, 1, 2014, Makassar: Fakultas A dab Dan Humaniora Uin Alaudin, hal. 104.

Serawak. Namun ada sisi utara Brunei yang menghadap laut lepas dan wilayah ini tidak berbatasan dengan Malaysia.²

Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei hanya berjumlah 420.000 orang. Sebanyak 67% dari total penduduknya beragama Islam. Selebihnya penganut Budha 13%, Kristen 10%, dan kepercayaan lainnya sekitar 10%. Ideologi yang digunakan Brunei Darussalam adalah negara Melayu Islam Beraja (MIB). Brunei Darussalam juga dikenal dengan negara yang sangat kaya serta memiliki penghasilan perkapita yang tinggi yakni sebesar 26.938,50 USD pada tahun 2016, hal tersebut dikarenakan Brunei Darussaalam memiliki sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Pemerintah Brunei juga mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan Industri. Pemerintahan Brunei juga gencar melakukan pembangunan berbagai fasilitas publik demi memanjakan rakyatnya.³

Pada bidang peradilan Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang terbagi dua yakni Sistem hukum Brunei yang berdasarkan pada hukum umum Inggris, kemudian sistem hukum Syariah paralel untuk Muslim, yang menggantikan sistem hukum umum di berbagai bidang seperti hukum keluarga dan properti. Namun sejak 1 Mei 2014 Sultan Brunei Darussalam yaitu Hassanal Bolkiah mengumumkan penerapan Syariah Islam yang ketat, yang diberlakukan untuk

² Naimah S Talib, *Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern*, Working Paper No.13, Maret 2013, Universitas Canterbury

³ Tgk Muhammad Iqbal Jalil, *Kokohnya ideologi Brunei Darussalam*, diakses dalam <http://aceh.tribunnews.com/2015/01/30/kokohnya-ideologi-brunei-darussalam> (22/11/2017, 08:22 WIB)

Muslim dan non-Muslim, dengan diberlakukannya Kitab Undang-undang KUHP Syariah 2013 (*Syariah Penal Code Order 2013*).⁴

Syariah Islam Brunei Darussalam diterapkan secara bertahap. Fase pertama yakni tahun 2014 mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran seperti tidak menjalankan Shalat Jumat dan hamil di luar nikah. Fase kedua dijalankan 12 bulan setelah fase pertama yang mencakup hukuman cambuk untuk pencuri dan yang meminum minuman keras. Kemudian fase ketiga dijalankan 24 bulan setelah fase kedua yang mencakup hukuman rajam dan potong tangan. Penerapan tersebut dilakukan bertahap bertujuan agar lebih efektif dan agar masyarakat terbiasa dengan peraturan baru tersebut. Sultan Hassanal Bolkiah menganggap penerapan Syariah Islam ini merupakan prestasi besar yang telah di raih Brunei, karena Brunei menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menerapkan Syariat Islam secara penuh.⁵

Sejak diumumkannya penerapan Syariah Islam di Brunei Darussalam oleh Sultan Hassanal Bolkiah, kesultanan Brunei mendapat banyak kritik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Banyak pihak yang menilai bahwa tindakan penerapan Syariah Islam yang dilakukan oleh Brunei banyak yang menyimpang serta tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Syariah Islam yang telah diterapkan dianggap terlalu kejam dan tidak berperikemanusiaan. Namun meskipun banyak kritik yang datang namun Sultan tetap kukuh melaksanakan Syariah Islam

⁴ *Southeast Asian Legal Research Guide: Introduction To Brunei & Its Legal System*, The University Of Melbourne, diakses dalam <http://Unimelb.Libguides.Com/C.Php?G=402982&P=4622754> (04/10/2018, 08:10 WIB)

⁵ *Syariah di Brunei Darussalam*, diakses dalam https://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/05/140502_forum_shariah (29/09/2018, 09:10 WIB)

walaupun masih secara bertahap. Keputusan menerapkan Syariah Islam ini menurut Sultan tidak untuk bersenang-senang, namun demi menaati perintah Allah.⁶ Seperti pada pernyataan Sultan Hassanal Bolkiah dibawah ini dalam sebuah rekaman video yang dirilis The Brunei Times :

“Alhamdulillah, dalam sejarahnya Brunei Darussalam selaku bumi bertuah ini (bumi yang diberkahi) tidaklah pernah meminta kebenaran dari sesiapa (siapapun) untuk memilih Islam sebagai agama resmi negara. Demikian juga, kita tidak meminta dari mana-mana pihak (dari pihak manapun) untuk melaksanakan undang-undang jenayah Syari’ah (pidana Syari’ah), demi kerana ia adalah semata-mata hidayat (petunjuk) khusus daripada Allah kepada kita. Sesungguhnya hidayat (petunjuk) itu adalah bulat (mutlak) menjadi hak Allah.”⁷

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena dengan adanya penerapan Syariah Islam ini akan membuat kesan Islam negara Brunei Darussalam semakin kuat karena seluruh sistem Sosial, Politik, maupun Ekonomi dituntut untuk berpedoman pada Syariah Islam, salah satunya yaitu pelarangan perayaan hari besar agama selain Islam tidak diperbolehkan digelar secara terbuka. Hal tersebut membuat Brunei Darussalam menjadi salah satu Rezim Islam di Asia Tenggara.

⁶ Hukum syariah di Brunei diterapkan bertahap, 2014, diakses dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/04/140430_brunei_syariah_bertahap (22/11/2017, 09:00 WIB)

⁷ Sirraaj, Sultan Brunei: kami tidak meminta pendapat siapapun untuk menerapkan hukum syariah, diakses dalam <https://www.annah.com/2013/10/23/sultan-brunei-tidak-pendapat-menerapkan-hukum-syariah> (29/09/2018, 11:20 WIB)

Selain itu pasca di terapkannya Syariah Islam di Brunei Darussalam muncul dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya memungkinkan menarik negara Islam untuk melakukan kerjasama dan Brunei dijadikan percontohan negara kawasan Asia Tenggara lain yang mempunyai penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Dampak negatif diantaranya terdapat kecemasan salah satunya dari penggiat HAM karena mereka menilai penerapan Syariah Islam terlalu kejam.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Brunei Darussalam Menerapkan Syariah Islam?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada Rumusan Masalah diatas, Penulis memiliki tujuan yaitu:
Untuk mengetahui alasan Brunei Darussalam menerapkan Syariah Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami alasan Brunei menjadi negara rezim Islam di kawasan Asia Tenggara melalui penerapan Syariah Islam tahun 2014 serta bermanfaat bagi mahasiswa Hubungan Internasional.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber terbaru dalam mengkaji kawasan Asia Tenggara khususnya di negara Brunei Darussalam.

1.4. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memerlukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yakni “Konstruksi Rezim Islam Brunei Darussalam Melalui Penerapan Syariah Islam” Disini peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yakni, 3 Jurnal dan 2 Skripsi.

Penelitian pertama, yaitu Jurnal berjudul *Penerapan Syariat Islam Di Negara Asean (Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam)*, oleh H. Abu bakar.⁸ Peneliti disini mengangkat tentang permasalahan mengenai penerapan Syariat Islam yang ada di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Peneliti berupaya menggambarkan bagaimana seharusnya syariat Islam bisa dengan mudah dijadikan sebagai hukum nasional di tiga Negara tersebut. Namun, kenyataannya justru sebaliknya hukum Islam justru tidak menjadi variabel utama dalam penerapan hukum di dalam tiga negara tersebut.

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa perkembangan Syariat Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, ternyata tidak lepas dari perkembangan sejarah yang ada dari dahulu hingga saat ini. Keberagaman budaya dan agama, ketersediaan sumber daya manusia dan dana, serta peran penjajah dalam memberlakukan sistem hukum terhadap hukum negara jajahannya itu sangat mempengaruhi perjalanan penerapan Syariat Islam di ketiga negara tersebut. Kondisi masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam proses penerapan syariat

⁸ H. Abu bakar, SH, MH, *Penerapan Syariat Islam Di Negara Asean (Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam)*, diakses dalam <http://pascailmuhukum.uia.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/Penerapan-Syariat-Islam-Di-Negara-Asean.pdf>, (23/11/2017 10:00 WIB)

Islam. Penelitian ini memiliki persamaan pada topik, namun dalam penelitian ini membahas Syariat islam lebih dari satu negara sedangkan yang dalam skripsi penulis hanya berfokus pada Brunei Darussalam.

Penelitian kedua, Jurnal yang berjudul *Sharia Law and the Politics of “Faith Control” in Brunei Darussalam Dynamics of Socio-Legal Change in a Southeast Asian Sultanate*, oleh **Dominik M. Müller**.⁹ Kebijakan Islamisasi Brunei sejak tahun 1980-an telah ada dan tak terpisahkan dengan transformasi sosial budaya dibawah negara MIB. Klasifikasi kekuasaan telah memicu perubahan yang luas dalam normativitas kehidupan sehari-hari. Tetapi dinamika perubahan sosial tidak sepenuhnya tidak terbantahkan, dan ketentuan hegemoni negara tidak hanya menentukan perilaku sosial. Meskipun banyak upaya yang mereka lakukan untuk mengendalikan iman, hukum dan birokrasi, pemerintah selaku pihak berwenang belum sepenuhnya berhasil memberantas perilaku yang menyimpang. Karena terus berlanjutnya pemujaan kuil, praktik bomoh, komunitas-komunitas yang terinspirasi dari Sufi menyebarkan taktik bertahan hidup yang kreatif, dan penciptaan Darussalam sebagai cara re-legitimasi.

Mempertimbangkan prioritas politik yang diberikan untuk kebijakan Islamisasi, dan mengesampingkan keyakinan tulus dalam mengumpulkan berkat ilahi di dunia ini dan akhirat untuk mewujudkan kehendak legislatif Tuhan. Mengetahui manfaat dari perluasan Syariah Syariah di Brunei Sultan dan sistem politiknya adalah pemenang yang paling jelas, karena SPCO semakin

⁹ Dominik M. Müller, *Sharia Law and the Politics of “Faith Control” in Brunei Darussalam Dynamics of Socio-Legal Change in a Southeast Asian Sultanate*, Internationales Asienforum, Vol. 46, No, 3–4 (2015), hal. 341.

mengkonsolidasikan kekuatan yang tidak dapat dipertanyakan dan adanya legitimasi ilahi. SPCO mendapat dukungan dari Universitas Islam Brunei UNISSA (Universiti Islam Sultan Sharif Ali) yang berarti bahwa menolak untuk menegakkan hukum hudud, bahkan jika diimplementasikan hanya pada tingkat simbolis, mungkin dapat menyebabkan ketidakpuasan ideologis yang mengakar kuat di antara masyarakat. Baik disengaja atau tidak, Islamisasi hukum Islam dapat mengambil alih calon oposisi Islamis masa depan, karena mereka cenderung untuk memastikan bahwa tidak ada gerakan oposisi di masa depan akan muncul dari ideasional politik Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan topik namun dalam pembahasan memiliki kesamaan yaitu terkait Hukum Syariah serta permasalahan sosial yang terjadi setelah adanya Syariah Islam.

Penelitian ketiga, yaitu Jurnal berjudul *Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam*, oleh **Abd. Ghofur**. Hubungan antara Islam dan negara, terdapat tiga teori yang menarik untuk dimunculkan sebagaimana dikemukakan Munawir Syadzali. Dia mengelompokkan hubungan tersebut kedalam tiga aliran yang memiliki pandangan berbeda. Pertama, Islam dianggap bukan semata-mata ajaran dalam pandangan Barat, yaitu hanya terkait hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna untuk segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan negara. Tokoh tokoh aliran ini antara lain Hasan alBanna, Sayyid Kuttub, dan Al-Maududi. Kedua, Islam dipandang sebagai agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad dipandang sebagai seorang rasul biasa, seperti rasul lainnya, tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.

Ideologi yang dimiliki oleh Brunei yaitu Melayu Islam Beraja (MIB), terdiri dari 2 dasar, yakni pertama, islam sebagai *guiding principle*, dan kedua islam sebagai *form of fortification*. Dua dasar ini kemudian melindungi penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan tiga konsep, yaitu mengekalkan negara melayu, mengekalkan negara islam dan mengekalkan negara beraja. Kedudukan agama Islam begitu jelas dalam perlembagaan negara namun undang-undang islam sebagai undang-undang dasar penjelasannya masih sangat terbatas dan belum menggambarkan negara Islam yang seutuhnya. Kedudukan Sultan yang begitu Absolut dalam ranah negara dan pemerintahan, termasuk sebagai ketua agama mempunyai peran istimewa dalam perlembagaan negara. Penelitian ini memiliki topik yang berbeda, namun dalam pembahasannya memiliki sedikit keterkaitan yaitu mengenai Islam serta politik negara Islam.

Penelitian keempat, yaitu Skripsi yang berjudul ***Penerapan Hukum Syariah Islam Di Brunei Darussalam, oleh Arini Firdausiyah.***¹⁰ Peneliti disini mengangkat tentang permasalahan mengenai penerapan Syariah Islam di Brunei Darussalam. Penerapan syariah islam ini dilaksanakan pada 1 Mei 2014. Namun penerapan tersebut dilakukan pada tiga tahap, dimulai dari tahap yang paling ringan, sedang, hingga berat. Penerapan Syariah Islam ini juga mendapat kecaman yang datang dari dalam maupun luar. Salah satu kecaman yang datang adalah dari HAM, mereka menilai penerapan ini menyimpang dari HAM. Namun ditengah permasalahan yang terjadi Sultan Hassanal Bolkiah tetap bertahan dengan

¹⁰ Arini Firdausiyah, 2017, *Penerapan Hukum Syariah Islam Di Brunei Darussalam*, skripsi, jember : jurusan ilmu hubungan internasional, universitas jember, hal. 2

keputusannya ini, demi legitimasi sultan didalam negeri. Sultan berharap agar masyarakat Brunei tidak perlu khawati atas penerapan ini karena hukum tersebut berlaku jika mereka melakukan kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif dengan menggunakan teori/konsep dalam menjelaskan data-data yang diperoleh. Dalam skripsi ini penulis disini menggunakan konsep legitimasi.

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa penerapan Syariah Islam yang dilakukan oleh Sultan Hassanal Bolkiah bertujuan untuk menjadikan negara Brunei menuju negara islam seutuhnya. Brunei Darussalam juga merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan Syariah Islam. Meskipun banyak kecaman yang datang namun hukum peradilan yang berlandaskan syariah Islam akan tetap dijalankan. Dengan adanya penerapan Syariah Islam ini akan membuat citra Islam Brunei semakin kuat, karena Brunei dari dulu sudah terkenal sebagai negara islam. Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang upaya legitimasi Sultan di dalam negeri, penulis juga membahas bagaimana Syariah Islam akan memperbaiki citra negara Brunei.

Penelitian kelima, yaitu Skripsi yang berjudul ***Alasan Implementasi Syariat Islam Di Brunei Darussalam, oleh Nita Rosella.***¹¹ Peneliti disini mengangkat tentang bagaimana Syariah Islam di terapkan serta banyaknya tantangan yang ditimbulkan dari penerapan Syariat Islam itu sendiri. Penerapan Syariat Islam tersebut juga terdiri dari beberapa fase, fase pertama di mulai dari hukuman paling ringan kemudian fase kedua dan ketiga dimulai dengan hukuman sedang hingga

¹¹ Nita Rosella, 2014, *Alasan Implementasi Syariat Islam Di Brunei Darussalam*, Skripsi. Malang: Ilmu Hubungan Ineternasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 4

berat. Hal ini bertujuan agar penerapan Syariat Islam dapat di terima masyarakat dengan baik dan terbiasa.

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa sejak adanya implementasi pada tahun pertama, Syariat Islam di Brunei Darussalam berjalan belum stagnan, dikarenakan hukum pidana yang harus di implentasikan tahun 2015 belum di impelentasikan seutuhnya. Keadaan stagnan ini, disebabkan oleh *Syariah Courts Criminal Procedure Code* (SCPC) yang masih belum menyelesaikan peraturan dan pasal-pasal terkait prosedur Syariat Islam terhadap Sultan. Pengertian SCPC sendiri merupakan lembaga pengadilan Syariat yang telah di bangun pada awal pembentukan Syariat Islam di Brunei Darussalam. Dengan mengangkat topik yang sama, yaitu tentang fase implentasi Syariah Islam Brunei Darussalam, perbedaanya terletak di bagian metode serta fokus yang diteliti.

Tabel 1.1 Identifikasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	Hasil
1	Jurnal : <i>Penerapan Syariat Islam Di Negara Asean (Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam),</i> Oleh : H. Abu bakar	Pendekatan Historis-Filosofi, Pendekatan Yuridis-Sosiologis Metode Deskriptif	- Tujuan penerapan syariat islam di ketiga Negara yaitu indonesia, malaysia dan Brunei Darussalam masih mengalami banyak kendala yang harus dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal. - Perkembangan Syariat Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, ternyata tidak lepas dari perkembangan sejarah yang ada dari dahulu hingga saat ini.

2	<p>Jurnal :</p> <p><i>Sharia Law and the Politics of "Faith Control" in Brunei Darussalam</i></p> <p><i>Dynamics of Socio-Legal Change in a Southeast Asian Sultanate,</i></p> <p>Oleh : Dominik M. Müller.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Brunei saat ini sedang mendapat kritik tajam dari internasional pengamat dan organisasi hak asasi manusia atas Reformasi hukum Syariah yang merubah hukuman secara drastis seperti rajam sampai mati untuk pelanggaran agama. - Hal ini menggambarkan secara etnografis bagaimana kebijakan agama terkait dengan perubahan normatif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan praktik budaya Melayu yang sudah lama ada dilarang dan terpinggirkan secara sosial dalam beberapa tahun terakhir.
3	<p>Jurnal :</p> <p><i>Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam,</i></p> <p>Oleh : Abd. Ghofur</p>	<p>Teori</p> <p>Makkah, Teori Cina, Teori Persia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Filosofi politik Brunei adalah menerapkan secara ketat ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar yaitu: pertama, islam sebagai guiding principle, dan kedua islam sebagai form of fortification. - Adanya penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan dengan tiga konsep, yaitu mengekalkan negara melayu mengekalkan negara islam (hukum islam yang bermazhab syafi'i dari sisi fiqhnya dan bermazhab ahl sunnah wal jamaah dari sisi akidahnya) dan mengekalkan negara beraja

4	<p>Skripsi :</p> <p><i>Penerapan Hukum Syariah Islam Di Brunei Darussalam,</i></p> <p>Oleh : Arini Firdausiyah</p>	<p>Konsep Legitimasi</p> <p>Metode Deduktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Syariah Islam Brunei tetap dilaksanakan meskipun mendapat banyak kecaman dari dunia internasional karena demi legitimasi Sultan dalam negeri - Legitimasi tersebut berkaitan dengan upaya penyelesaian berbagai pelanggaran hukum serta meningkatkan citra Brunei sebagai negara islam yang dapat menarik investor dari negara Arab
5	<p>Skripsi :</p> <p><i>Alasan Implementasi Syariat Islam Di Brunei Darussalam,</i></p> <p>Oleh : Nita Rosella</p>	<p>Konsep Kepentingan Nasional</p> <p>Metode Ekspalanatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Syariat Islam di bagi keedalam tiga fase, tahun 2014 merupakan tahun pertama syariah islam di umumkan - Sejak adanya implementasi pada tahun pertama, Syariat Islam di Brunei Darussalam masih terbilang belum bergerak, dikarenakan hukum pidana yang harus di implentasikan tahun 2015 belum di impelentasikan seutuhnya. Keadaan ini, disebabkan oleh <i>Syariah Courts Criminal Procedure Code (SCPC)</i>

6	<p>Skripsi :</p> <p><i>Konstruksi Rezim Islam Brunei Darussalam Melalui Penerapan Syariah Islam,</i></p> <p>Oleh : Ayu Tifani Khairul Putri</p>	<p>Teori Rezim Internasional,</p> <p>Konstruktivis Level Unit</p> <p>Metode : Eksplanatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Syariah Islam pada 1 Mei 2014 bertujuan mengkonstruksi Brunei sebagai negara rezim Islam semakin kuat dimata internasional. - Pandangan terhadap Islam menguat sejak di terapkannya hukum pidana yang berdasarkan pada Syariah Islam. Brunei Darussalam juga menjadi rezim Islam karena hampir semua bidang di Brunei Darussalam harus berlandaskan pada Syariah Islam terutama dalam bidang peradilan.
---	---	---	--

1.5.Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, Teori sangat penting dalam menyelesaikan tulisan secara fokus dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Rezim Internasional dengan pendekatan Konstruktivis Level Unit.

1.5.1. Teori Rezim Internasional

Definisi Rezim Internasional secara umum, merupakan seperangkat prinsip norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan seputar, dimana ekspetasi aktor-aktor muncul dalam isu pada area tertentu.¹² Rezim sendiri memiliki tujuan memfasilitasi berbagai kesepakatan yang telah dibuat oleh pesertanya. Rezim Internasional umumnya memiliki sifat transparan, informasi tersalurkan secara merata kepada seluruh peserta. Oleh sebab itu setiap pihak dapat menebak

¹² Drs. Yanuar Ikbar, 2014, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, Bandung : Refika Aditama, hal. 282.

berapa kira-kira keuntungan yang didapat oleh pihak lainnya. Kebutuhan tentang Rezim Internasional dapat muncul ketika adanya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh aktor-aktor negara maupun non negara akibat adanya saling ketergantungan serta masalah masalah yang timbul akibat sifat saling ketergantungan tersebut.¹³

Teori Rezim selalu dikaitkan dengan Organisasi Internasional, dalam perkembangannya Rezim dan Organisasi Internasional bersifat tidak tetap dan bisa kapan saja berubah. Pemikiran tersebut sudah ada sejak zaman Yunani Kuno.¹⁴ Menurut Young dalam mempelajari Rezim terdapat pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama melihat Rezim Internasioal sebagai Institusi Internasional, dalam hal ini penggunaan Rezim dan Organisasi Internasional menjadi tumpang tindih dan bisa digunakan secara bergantian. Sedangkan pandangan kedua melihat bahwa Rezim dan Organisasi Internasional adalah hal yang berbeda. Jadi keduanya memiliki perannya masing-masing meskipun tidak jarang ada kasus rezim yang berada dalam pembahasan organisasi internasional.¹⁵

Rezim juga dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh Organisasi Internasional. Robert Keohane mengemukakan bahwa Rezim Internasional adalah institusi dengan aturan-aturan yang terlihat secara eksplisit, yang disepakati bersama, yang membahas seperangkat isu tertentu dalam hubungan internasional. Salah satu contoh Rezim Internasional yang bukan bagian dari Organisasi Internasional yaitu

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hennida citra, M.A., 2015, *Rezim Dan Organisasi Internasional*, malang : intrans publishing, hal 13.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 6

Protocol Kyoto.¹⁶ Protocol Kyoto merupakan Rezim, namun dia bukan merupakan organisasi internasional karena tidak memiliki institusi serta struktur institusi didalamnya.

Dalam Rezim Internasional juga terdapat 3 pendekatan yang disebutkan oleh Hansclever, Mayer, Dan Rittberger, antara lain Pendekatan Berbasis Power, Pendekatan Berbasis Kepentingan, dan yang terakhir Pendekatan Konstruktivis (Pengetahuan).¹⁷

Pendekatan Konstruktivis (Pengetahuan) dalam Rezim Internasional

Penelitian ini mengarah ke Teori Rezim dengan menggunakan Pendekatan Konstruktivis. Konstruktivis berdiri pada akhir 1980-an dan awal 1990-an oleh para pemikir seperti Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Emanuel Adler, Friedrich Kratochwil, John Gerard Ruggie dan Peter Katzenstein. Konstruktivis sendiri mempunyai hal yang mendasar yaitu pengetahuan. Dalam konstruktivis sosial negara terbentuk dari kepentingan dan identitas. Rezim menyebut pendekatan konstruktivis dengan pendekatan berbasis pengetahuan. Hansclever menjelaskan bahwa konstruktivis menekankan pada aspek kausal dan pengetahuan sosial aktor sebagai variabel dalam unit analisisnya.¹⁸ Pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku negara pada rezim internasional mendapat pengaruh dari aspek kognitif.

Konstruktivisme mungkin masih dilihat sebagai sebuah gerakan oposisi dalam teori HI dan alternatif yang benar-benar radikal seperti teori-teori HI yang tertanam secara konvensional sebagai neorealisme dan neoliberalisme, atau

¹⁶ *Ibid.*, hal. 2-3

¹⁷ *Ibid.*, hal 76

¹⁸ *Ibid.*, hal. 112

pendekatan khusus hubungan internasional yang menekankan karakter sosial, ideasional dan intersubjektif dunia politik. Struktur hubungan internasional dibangun secara sosial dan bahwa struktur ini membentuk identitas dan kepentingan aktor, bukan hanya perilaku mereka, konstruktivis juga memiliki bentuk dan fokus yang berbeda, oleh karena itu adanya istilah oleh beberapa orang sebagai pendekatan untuk menganalisis politik dunia.¹⁹

Dalam perspektif alternatif, konstruktivisme yang berkembang selama tahun 1990-an dikategorikan ke dalam tiga bentuk yang berbeda yaitu²⁰ :

a. Konstruktivis Level Sistemik

Konstruktivis sistemik menurut Alexander Wendt adalah interaksi yang membentuk identitas diri. Konstruktivisme ini memiliki tingkat analisis citra ketiga Waltzian neo-realis dengan demikian berkonsentrasi pada interaksi antara aktor negara kesatuan di antara mereka dengan mengorbankan apa yang terjadi di dalamnya. Jenis konstruktivisme ini diyakini telah ditekankan pada politik domestik negara serta perannya dalam membangun atau mengubah identitas.

b. Konstruktivis Level Unit

Konstruktivis ini berpendapat bahwa politik domestik lebih penting daripada sistem. Dalam konstruktivis level unit yang diwakili oleh Peter Katzenstein, berfokus pada negara-negara domestik, dunia politik, atau dalam pandangan Reus-Smit tentang hubungan antara sosial, domestik, norma hukum, identitas, kepentingan negara, dan dengan strategi keamanan nasional mereka.

¹⁹ Maysam behraves, *Constructivism: An Introduction*, diakses dalam <https://www.e-ir.info/2011/02/03/constructivism-an-introduction/> (13/10/2018, 08:30 WIB)

²⁰ Dr. Dinmuhammed AMETBEK, *Perception and Constructivism*, ANKASAM, diakses dalam <https://ankasam.org/en/perception-and-constructivism/> (14/10/2018, 08:14 WIB) hal. 2

c. Konstruktivis Level Holistik

Konstruktivis holistik merupakan penghubung antara konstruktivis sistemik dan konstruktivis level unit. Konstruktivis ini sebenarnya berusaha menjembatani kesenjangan antara internasional dan domestik dalam menjelaskan bagaimana identitas dan kepentingan negara dibentuk. G Ruggie dan Friedrich Kratochwil, mengatakan bahwa konstruktivisme holistik menetapkan untuk mengintegrasikan dalam negeri yang merupakan identitas negara dan identitas sosial yang dikendalikan secara internasional menjadi perspektif analitis terpadu yang memperlakukan sistem domestik dan internasional sebagai dua wajah tunggal tatanan sosial dan politik.

Penulis lebih berfokus pada kategori Konstruktivis Level di unit dimana pendekatan ini menekankan pada hubungan antara norma-norma sosial dan legal ditingkat domestik bagi identitas dan kepentingan-kepentingan negara. Dalam sebuah buku yang disunting oleh Peter Katzenstein, para konstruktivis lainnya berfokus pada bidang keamanan nasional yang menunjukkan bahwa itu dibangun terutama oleh faktor-faktor domestik, yaitu budaya dan identitas negara-negara.²¹ Meskipun tidak sepenuhnya mementingkan peran norma-norma internasional dalam pengkondisian identitas dan kepentingan negara, Katzenstein memberikan perhatian internal sebagai faktor penentu dalam kebijakan nasional. Katzenstein menekankan pentingnya budaya dan identitas sebagai kausal yang membantu mendefinisikan kepentingan dan membenarkan para aktor yang membentuk

²¹ Mag. Enes Bayraklı, *Turkish Foreign Policy in Transition : The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy (A holistic Constructivist Approach)*, Dissertation, Turki : Doktor der Philosophie (Dr. phil), Uniersitat Wien, hal. 59

kebijakan. Dalam hal ini, Peter Katzenstein menunjukkan perbedaan antar negara yang mencerminkan institusionalisasi norma-norma sosial dan legal yang berbeda di tingkat nasional.²² Jadi pada intinya konstruktivis menurut Peter Katzenstein lebih mengarah ke kebijakan dalam negeri serta mendapat pengaruh dari budaya yang kuat.

Agama Islam di Brunei sendiri merupakan sebuah norma sosial yang tertanam sejak dulu di Brunei Darussalam. Setelah itu munculah UU penerapan Syariah Islam atau *Syariah Penal Code Order* (SPCO) pada tahun 2013 yang kemudian baru di terapkan pada tahun 2014, Syariah Islam menjadi dilegalkan dan akhirnya terbentuklah negara Brunei Darussalam yang berbasis Islam. Oleh sebab itu Syariah Islam yang dulu hanya menjadi norma sekarang sudah menjadi identitas legal negara Brunei Darussalam yang di akui oleh dunia internasional.

Dalam penelitian ini pemerintah Brunei Darussalam menjadi aktor dalam penerapan Syariah Islam melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan Hassanah Bolkiah kemudian di sepakati bersama dan diumumkan oleh Sultan Hassanah Bolkiah pada 1 Mei 2014. Keputusan penerapan Syariah Islam merupakan kebijakan yang dikeluarkan Sultan yang tidak dapat bantah karena Sultan merupakan pemegang kekuasaan penuh di Brunei Darussalam serta murni dari faktor internal negara Brunei tanpa meminta persetujuan dari negara lain. Penerapan ini diumumkan melalui surat kabar kenegaraan.

²² Andhytta Novie Kartikaningtyas, *perspektif konstruktivis atas Pergeseran Official Development Assistance Jepang Dari Asia Ke Afrika*, diakses dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12144/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, (12/10/2018, 09:00 WIB)

Dalam konteks ini Brunei Darussalam yang memang dikenal dengan negara yang dari dulu dikenal dengan negara Islam khususnya di kawasan Asia Tenggara yang mampu eksis hingga saat ini. Ditengah arus globalisasi yang semakin kuat Brunei Darussalam mampu untuk tetap bertahan dalam negara Islam yang semakin tergeser oleh pesatnya budaya baru yang datang dari luar. Dalam sistem pemerintahannya Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah dimana kekuasaan dipegang penuh oleh Sultan dan semua kebijakan yang ada di Brunei harus mendapat persetujuan olehnya.

Syariah Islam yang diterapkan pada 1 Mei 2014 membuat kesan Brunei Darussalam sebagai negara Islam yang dikenal dunia internasional kini semakin kuat dan terlihat nyata. Bukan hanya untuk memperkuat pandangan Islam, penerapan ini juga untuk memperbaiki pandangan terhadap pemerintahan Brunei dimata masyarakat internasional terutama kawasan Asia Tenggara serta untuk mempertahankan legitimasi Sultan di dalam negeri. Upaya Sultan Hassanal Bolkiah dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan yang harus berlandaskan pada Syariah Islam membuat Brunei kini menjadi negara dengan Rezim Islam.²³

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi eksplanatif, dimana penulis mengumpulkan data untuk di olah serta di analisis dengan menggunakan

²³Brunei Times, *Implementation Of Shariah Law*, Di Akses Dalam [https:// Btarchive.Org/News/National/2014/12/15/Implementation-Syariah-Law](https://Btarchive.Org/News/National/2014/12/15/Implementation-Syariah-Law) (26/09/2018, 21:30 WIB)

teori dan berupaya menjelaskan Konstruksi Rezim Islam Brunei Darussalam Melalui Penerapan Syariah Islam.

1.6.2. Metode Analisis

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduksi dimana penulis menggunakan teori yang ada untuk menjelaskan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dielaborasi.

1.6.3. Tingkat Analisa dan Variabel Penelitian

Tingkat analisa berperan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa fenomena sosial yang terjadi. Dalam hubungan internasional terdapat beberapa tingkat analisa antara lain individu, negara dan sistem internasional. Pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa negara yaitu Brunei. Variabel dependen atau unit analisa merupakan perilaku yang akan dideskripsikan dan dijelaskan, dalam penulisan ini yaitu bagaimana Brunei menjadikan Rezim Islam Melalui Penerapan Syariah Islam. Sedangkan variabel independen atau unit eksplanasi yaitu dampak terhadap unit analisa yang akan diamati, dalam penulisan ini adalah Pelaksanaan Syariah Islam Oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki korelasi antara negara dengan negara karena berada pada level yang sama.

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan waktu

Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan waktu yaitu dari tahun 2013-2016, dimana pada tahun 2013 dimana dikeluarkannya UU tentang pelaksanaan

Syariah Islam (*Sharia Penal Code Order*), dan tahun 2016 merupakan tahap akhir dari fase-fase pelaksanaan Syariah Islam yang telah dijalankan ditahun sebelumnya.

b. Batasan Materi

Penelitian ini berfokus pada dinamika penerapan Syariah Islam di Asia Tenggara khususnya Brunei Darussalam. Dimana Brunei merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan Syariah Islam secara penuh, kemudian Brunei akan mengkonstruksi dirinya sebagai negara Rezim Islam ketika Syariah Islam diumumkan serta diterapkan pada tahun 2014. Hal ini kemudian akan menggambarkan bahwa setiap rezim di kawasan Asia Tenggara terbentuk atas kepentingan para pemimpin negara tersebut.

1.6.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library reseach*), dimana peneliti mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, *working paper*, jurnal, artikel, web resmi dan media lainnya.

1.7. Hipotesa

Adapun hasil sementara dari penulis terkait Konstruksi Rezim Islam Brunei Darussalam Melalui Penerapan Syariah Islam berdasarkan Teori Rezim Internasional dengan pendekatan Konstruktivis Level Unit. Penerapan Syariah Islam yang di terapkan Brunei Darussalam pada 1 Mei 2014, dimana Brunei ingin mengkonstruksi dirinya menjadi negara Rezim Islam dengan cara menerapkan Syariah Islam di berbagai aspek kehidupan dalam cakupan domestik. Pandangan terhadap Islam menguat sejak di terapkannya hukum pidana yang berdasarkan pada

Syariah Islam. Meskipun Brunei Darussalam bukan satu-satunya negara Islam di kawasan Asia Tenggara namun masyarakat Asia Tenggara akan melihat Brunei sebagai negara Islam karena Brunei menjadi negara pertama yang menerapkan Syariah Islam, hal ini menggambarkan bahwa setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki karakteristik rezim tersendiri tergantung kepentingan negara tersebut. Brunei juga akan menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan Islam melalui BIBD (Bank Islam Brunei Darussalam) yang telah dinobatkan sebagai bank ritel terbaik dari The Asian Banker (TAB). Meskipun mendapat banyak kecaman atas Penerapan Syariah Islam tersebut, namun Sultan Hassanal Bolkiah tetap kukuh menjalankan Hukum Syariah demi legitimasi Sultan di dalam negeri.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode penelitian 1.6.3 Tingkat Analisa dan Variabel Penelitian 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.5 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Hipotesa 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	DINAMIKA PENERAPAN SYARIAH ISLAM BRUNEI DARUSSALAM TAHUN 2014 2.1 Sejarah Penerapan Syariah Islam 2.2 Tahap Penerapan Syariah Islam 2.3 Respon Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Brunei Darussalam 2.3.1 Reaksi Internal 2.3.2 Reaksi Eksternal

BAB III	<p>PERKEMBANGAN REZIM BRUNEI DARUSSALAM DAN BEBERAPA NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA</p> <p>3.1 Karakteristik Rezim Beberapa Negara di Asia Tenggara</p>
BAB IV	<p>SYARIAH ISLAM SEBAGAI UPAYA KONSTRUKSI REZIM ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM</p> <p>4.1 Karakteristik Rezim Brunei Darussalam</p> <p>4.2 Kepentingan Brunei Darussalam Dalam Penerapan Syariah Islam</p> <p>4.2.1 Ekonomi</p> <p>4.2.2 Politik</p> <p>4.2.3 Pandangan Terhadap Pemerintah</p> <p>4.3 Beberapa Aspek Kehidupan Brunei Berdasarkan Syariah Islam</p> <p>4.3.1 Bidang Pendidikan Islam</p> <p>4.3.2 Bidang Perbankan Islam</p> <p>4.3.3 Bidang Peradilan Islam</p>
BAB V	<p>PENUTUP</p> <p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>